

SASTRA DAN KEKUASAAN DI ERA ORDE BARU

Oleh Suroso

Universitas Negeri Yogyakarta

surosoLSIP@yahoo.com

Pada rejim Soeharto (1966-1998), disebut juga era orde baru, melalui Kejaksaan Agung pemerintah melarang beberapa buku sastra untuk dimiliki, disimpan, diedarkan, dan dibaca. Buku-buku sastra yang dimaksud terutama adalah buku-buku yang ditulis oleh para pengarang Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) yang dianggap pemerintah pada waktu itu berafiliasi pada komunis. Salah seorang korban pelarangan buku tersebut adalah Bambang Isti Nugroho, mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang dijatuhi hukuman penjara karena membaca dan mengedarkan buku *Bumi Manusia*, salah satu buku seri pertama Tetralogi pulau Buru karya Pramudya Ananta Toer.

Selain buku sastra masih ada beberapa terbitan yang dilarang penguasa Orde Baru karena dianggap kritis terhadap pemerintah. Salah satunya publikasi Majalah Independen. Majalah tersebut terbit secara diam-diam melalui gerakan di bawah tanah sebagai bahan bacaan alternatif untuk menyikapi pemerintahan Soeharto pasca di Era kejatuhan Soekarno. Hal-hal yang berbau Soekarno dilarang. Desoekarnoisme. Beberapa terbitan bahkan dibredel karena menyuarakan kepentingan masyarakat. Surat Ijin Usaha Percetakan dan Penerbitan (SIUPP) Tempo, Detik dan Editor dicabut melalui Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No 123/KEP/MeNPEN/1994 tanggal 21 Juli 1994. (Utami, 1994:107)

Mengapa rejim Soeharto yang diebut juga era Orde Baru begitu represif terhadap karya sastra dan karya jurnalistik? Menurut Heryanto (1996) Barangkali regim menganggap bahwa karya sastra sebagai isme punya tradisi panjang untuk merayakan keterbukaan makna, ketidakterpaduan, kemajemukan, ketidakpastian atau ambiguitas. Tentu saja sastra yang dimaksud adalah sastra yang tidak terkungkung oleh romantisme dan humanisme, namun sastra yang postmodernisme, satu diantaranya adalah otokritik terhadap kecongkakan ilmu dan kekuasaan Barat di dunia dalam pembangunan di Indonesia.

Tulisan ini akan mendeskripsikan kategori karya sastra yang dianggap membahayakan regim pada masa orde baru dan hubungan bahasa sastra dan ideologi.

Bahasa dan Ideologi

Bahasa sebagai medium sastra dan ideologi tidak dapat dilepaskan dari konteks hubungan antara bahasa dan kekuasaan karena perilaku ideologi hanya dapat diamati dari praktik kekuasaan (Fairclough (1989). Hubungan antara bahasa dan kekuasaan mulai terjalin ketika Jean Baudrillard, Jurgen Habermas, dan Antonio Gramsci (Via Latif dan Ibrahim, 1996:15) mengemukakan gagasan mereka mengenai bahasa dan kekuasaan. Habermas memandang bahwa bahasa sebagai medium untuk menghubungkan sang subjek dengan tiga wilayah yaitu wilayah eksternal, wilayah sosial, dan wilayah dunia. Wilayah eksternal mengacu pada situasi diluar masyarakat tempat subjek berada. Wilayah sosial mengacu pada totalitas hubungan antarpribadi yang memiliki aturan normatif dalam masyarakat. Wilayah dunia mengacu pada maksud-maksud dan pengalaman subjektif penutur.

Disampaikan dalam Seminar Nasional "Bahasa, Sastra, dan Kekuasaan" yang dilaksanakan pada 26 November 2015 di Ruang Seminar Gedung PLA Lt 3, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta

Dengan demikian konteks hubungan bahasa sastra dengan tiga wilayah ini menunjukkan bahwa bahasa sastra adalah media dominasi dan kekuasaan.

Pengaruh dimensi eksternal dalam bahasa memunculkan istilah kekuatan (*force*) dan hegemoni (*hegemony*) kekuatan lebih ditafsirkan sebagai penggunaan daya paksa untuk membuat orang lain menaati syarat-syarat tertentu. Hegemoni sebagai kepatuhan aktif dari kelompok-kelompok yang didominasi oleh kelas yang berkuasa melalui penggunaan kepemimpinan intelektual, moral, politik atas teks dan penafsirannya.

Jika pada orde Soeharto mampu menciptakankata-kata yang dapat menekan, menyudutkan, mengerem, dan menyeragamkan kata, puisi-puisi Wiji Tukul pun, mampu memberikan kekuatan moral rakyat yang anti Soeharto untuk melakukan perubahan. Akibat dari kuasa rejim waktu itu, Wiji Tukul sampai saat ini dihilangkan dan tak tak tahu dimana berada. Dengan kata lain, rejim akan melalui konstruksi bahasa yang diciptakan mengembangkan dan memperluas kekuasaannya dan pengkritik rejim menggunakan bahasa untuk mematahkan pengaruhnya.

Simak puisi berikut yang menunjukkan bahwa bahasa puisi memiliki kuasa untuk menggerakkan masa melawan rejim (Tempo. 2013).

PERINGATAN

Jika rakyat pergi

ketika penguasa pidato

kita harus hati-hati

barangkali mereka putus asa

Kalau rakyat sembunyi

dan berbisik-bisik

ketika membicarakan masalahnya Sendiri

penguasa harus waspada dan belajar mendengar

Bila rakyat tidak berani mengeluh

Itu artinya sudah gawat

dan bila omongan penguasa

tidak boleh dibantah

Disampaikan dalam Seminar Nasional “Bahasa, Sastra, dan Kekuasaan” yang dilaksanakan pada 26 November 2015 di Ruang Seminar Gedung PLA Lt 3, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta

kebenaran pasti terancam

Apabila usul ditolak tanpa ditimbang

suara dibungkam kritik dibungkam tanpa alasan

dituduh subversif dan mengganggu keamanan

maka hanya ada satu kata: lawan!

Sebetulnya kalimat terakhir dalam puisi Wiji Thukul “maka hanya satu kata: lawan! terpengaruh oleh puisi yang dibuat temannya Pardi di Teater Jagat, berjudul bambu runcing. “... Ini penindasan yang tidak boleh kita biarkan/Tapi jika bambu runcing kita hancur luluh/Terbakar api senjata musuh/Pada kita masih ada satu kata: LAWAN!”. Kalimat terakhir pada puisi *Peringatan* Wiji Thukul sebagai maknit pergerakan demo menentang rejim Orde baru pada 1998 yang menjatuhkan Soeharto dari jabatan presiden yang telah dikuasai selama 32 tahun pada 21 Mei 1998 dan diangkatnya Wakil Presiden BJ. Habibie untuk menjabat Presiden RI selama 1 tahun untuk menyiapkan penyelenggaraan pemilu di era reformasi 1998. “Maka hanya ada satu kata:lawan!. Puisi mampu memiliki hegemoni menggerakkan massa dan mengubah rejim selain juga partisipasi para penggerak reformasi Indonesia.

Bukan hanya puisi Wiji Thukul yang memberi kekuatan moral, puisi-puisi Cak Nun (Emha Ainun Najib), Linus Suryadi AG, Gus Mus (KH Mustofa Bisri), dll. Gus Mus dicekal tidak boleh membacakan puisinya dalam *Poetry Reading Solidaritas Bosnia* pada pertengahan tahun 1990-an (Budidarma, 2007:191). Dramawan Ratna Sarumpait juga dicekal di beberapa kota ketika mementaskan drama “Marsinah Menggugat” oleh Teater Satu Merah Panggung. Drama tersebut berkisah pembunuhan Marsinah, aktivis Buruh Pabrik di Sidoardjo yang diculik, disiksa, diperkosa, dibunuh, dan mayatnya dibuang di hutan jadi di Kabupaten Nganjuk. Aparat keamanan bersenjata lengkap membubarkan pentas teater Marsinah Menggugat di Bandung, bagaikan menghadapi atu batalyon tentara musuh.

Walaupun tidak secara langsung mengkritik pemerintah Drama N. Riantiaro, Puisi Taufik Ismail dalam *Tirani dan Benteng* dan *Malu Aku jadi Orang Indonesia* (MAJOI), puisi Sutardji Calzoum Bahri, dan Cerpen Putu Wijaya, menggunakan bahasa yang memiliki hegemoni berdampak pada para pembacanya. Kritik dalam karya sastra dapat dilakukan secara tidak langsung seperti yang terjadi di Thailand, Hongkong, Korea, dan Negara-negara Asia lainnya (Hartono via Budidarma, 2007:190)

Bahasa dan Politik

Menurut Budidarma (2007:183) sastra langsung atau tidak langsung ditentukan oleh politik. Oleh karena sastra merupakan kias zamannya, maka sastra tidak dapat dilepaskan dari politik. Berkaitan dengan kenyataan itu, seringkali terjadi pencekalamn terhadap sastra. Bahkan ada cecal yang tidak masuk akal, karena ketakutan penguasa. Kadang cecal ini berubah menjadi senjata makan tuan. Sastra yang dicekal justru menjadi dikenal oleh dunia internasional, karena dinobatkan sebagai

Disampaikan dalam Seminar Nasional “Bahasa, Sastra, dan Kekuasaan” yang dilaksanakan pada 26 November 2015 di Ruang Seminar Gedung PLA Lt 3, Fakultas Bahasa dan Seni, Univesitas Negeri Yogyakarta

peraih hadiah nobel. Sebenarnya cecak tidak hanya terjadi dalam sastra, namun juga dalam berbagai aspek kehidupan. Salman Rusdy penulis Inggris keturunan India, sampai saat ini masih difatwa hukuman mati oleh pemerintah Iran karena menulis novel yang merendahkan Nabi besar umat beragama. Fatwa ini belum dicabut walaupun Salman Rusdy masih hidup di Inggris dan dikawal oleh Scotland Yard.

Beberapa novel Indonesia yang menjadi pembicaraan hangat hubungannya dengan kekuasaan adalah Novel “tuhan ijin kan aku menjadi pelacur” (Melibas, 2003) karya Muhidin M Dahlan karena berkisah tentang tokoh agama tertentu dan praktik beragama dalam sebuah lembaga dan organisasi umat. Tampak sebagian pembaca tertentu kurang berterima narasi yang dikisahkan dalam novel tersebut. Novel “Sang penghadang” karya Taufik Tan (Manhaj, 2008) berkisah tentang misiologi yang dilakukan agama tertentu terhadap kepercayaan lain dengan pola misiologinya. Membelokkan akidah agama untuk pindah agama lain karena kekuasaan. Kedua novel berkisah dua agama yang berbeda namun ada sesuatu yang ingin dikemukakan melalui paparan bahasanya yaitu kuasa bahasa untuk mengubah orang pada ideologi dan keyakinannya. Dari kedua novel tersebut pembaca disarakan untuk memahami betapa besarnya kuasa bahasa melalui narasi tokoh yang mampu mengubah iman seseorang. Bagi pemeluk agama tertentu, membaca Novel “Keluarga Permana” Karya Ramadhan KH akan memperoleh informasi betapa susahnyanya akibat orang yang melakukan perkawinan antaragama.

Novel-novel terkenal Indonesia karya Pramudya Ananta Toer, Eka Kurniawan, Andrea Hirata yang diterjemahkan dalam berbagai bahasa pada pameran buku di Frankfurt Jerman misalnya, tidak lepas dari politik. Mengapa orang-orang Barat menyukai kisah tetralogi pulau Buru mdalam novel *Bumi Manusia*, kisah sekolah reyot di Bangka Belitung dalam novel *Laskar Pelangi*?. Selain berkaitan dengan kuasa bahasa, ada faktor lain yang menyebabkan buku tersebut berkategori kelas dunia. Selain faktor sejarah, kemanusiaan, dan pengorbanan, ada faktor politik yang menyebabkan buku-buku tersebut diperhitungkan di dunia internasional. Buku *best seller* “Laskar Pelangi” karya Andrea Hirata misalnya, karya tersebut belum berkategori sastra serius menurut para kritikus sastra, namun menjadi terkenal karena penulisnya pernah tinggal di Prancis dan memiliki jaringan internasional. Dengan demikian, selain faktor bahasa ada faktor lain yang menjadikan karya sastra terkenal atau tidak. Selain faktor kritikus sastra, faktor media massa dan media sosial berperan dalam “menduniakan “ karya sastra Indonesia. Oleh karena itu, berbagai pihak dapat bekerja ekstra menerjemahkan karya-karya sastra Indonesia ke dalam bnerbagai bahasa dunia untuk berpeluang mendapatkan penghargaan nobel sastra.

Kuasa Bahasa

Selain bahasa tulis, karya sastra lebih memiliki kuasa jika dipentaskan dalam bentuk pembacaan fragmen, baca puisi, dan pementasan karya drama. Orang seperti Rendra dan Emha Aiunun Nadjib mampu menghipnotis pembaca sastra dengan karya-karya yang dibacakan melalui *poetry reading* atau baca puisi. Bahkan untuk melihar Rendra membaca puisi orang harus membeli tiket pertunjukan yang tidak murah . Mendengarkan Rendra Baca Puisi “Sajak Sebatang Lisong” di Kampus ITB pada 1972 misalnya, betapa hidup kata-kata yang diucapkan penyair ini. Walaupun puisi itu dibawakan lebih dari tiga dasawarsa, makna puisi tersebut masih kontekstual pada zaman sekarang. Bahasa sastra yang dibacakan mampu menghipnotis, memberi semangat, kontemplasi, Disampaikan dalam Seminar Nasional “Bahasa, Sastra, dan Kekuasaan” yang dilaksanakan pada 26 November 2015 di Ruang Seminar Gedung PLA Lt 3, Fakultas Bahasa dan Seni, Univesitas Negeri Yogyakarta

dan pencerahan soal kemanusiaan, kebudayaan, bahkan keangkaramurkaan yang dilakukan oleh sekelompok manusia dan para kroninya.

Bagi penguasa memberangus karya sastra tidaklah mudah. Protes melalui karya seni dapat dilakukan melalui lirik bermediakan bahasa. Lirik puisi yang dinyayikan oleh Iwan Fals seperti : *Bento dan Bongkar*, dan *Presiden* , misalnya jelas mengkritik pribadi-pribadi seperti penguasa serakah atau presiden yang tak mampu mengatasi pengangguran. Penguasa tidak bisa memenjarakan penulis dan pelantun lagu, namun hanya mencekal Iwan Fals tour musik di 100 kota.

Kini zaman sudah berubah, novel-novel dan karya sastra penulis Lekra yang pernah dilarang oleh pemerintah sudah tercetak dan dijual bebas di toko buku dan dengan mudah pembaca memilikinya. Masihkan penguasa melihat bahwa karya sastra dianggap sebaga “produk membahayakan”? Paradigma ini harus ditinggalkan ketika persoalan keberaksaraan nasional kita masih dalam titik nadir. Perlu publikasi karya sastra besar-besaran. Perlu penerjemah profesional yang menduniakan karya sastrawan Indonesia, peru regulasi yang memudahkan penulis dan penerbit agar pembaca bisa memperoleh bacaan yang murah dan mudah. Bangsa Indonesia menjadi melek aksara dengan memperoleh berita dan cerita melalui karya sastra anak bangsa.

Sastra selain mampu memberi manfaat dan kenikmatan, sastran mampu memberi kuasa bahasa untuk mengubah rejim. Bangsa Indonesia memiliki puisi yang sangat indah yang diciptakan dan dibacakan oleh para pemuda padaKongres 28 Oktober 1928: “Menjunjung Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia” Bahasa selain dapat berfungsi mempersatukan juga dapat mengubah keadaan seperti yang ditulis oleh para penyair, novelis dan cerpenis dan dramawan kita.

Rekomendasi Pengembangan Kesusasteraan

Setelah bahasa Indonesia dirumuskan lebih dari 80 tahun pasca sumpah pemuda untuk mewujudkan bagsa yang berkepribadian dalam bidang budaya sudah selayaknya menempatkan sastra bagian dari politik sastra nasional. Menurut Rosidi (1984: 121) Jika sastra dianggap penting sederajat dengan kedudukan bahasa Indonesia, perlu ada upaya pendidikan sedemikian rupa agar setiap anak Indonesia mengenal sastra nasionalnya dengan baik. Mengingat sastra nasional Indonesia itu terdiri dari sastra dalam bahasa nasional dan bahasa daerah, baik klasik maupun modern, tidakkah memang perlu suatu pendidikan yang berencana dan teratur dalam mempelajari dan menerjemahkan karya-karya sastra dalam bahasa daerah, bahasa nasional, dan bahasa asing, baik yang klasik maupun modern.

Beberapa gagasan yang dikemukakan oleh Rosidi (1984:123) mengenai pendidikan sastra yang saat ini masih belum dilaksanakan sepenuhnya diantaranya (1) menyediakan buku-buku sastra Indonesia secara lengkap, baik buku terjemahan, saduran baik dari sastra daerah maupun sastra dunia baik klasik maupun modern; (2) memberikan rangsangan bagi karya kreatif dengan memberi hadiah tahunan berdasarkan karya, baik yang dilakukan pemerintah mauun swasta; (3) memberi rangsangan bagi penerbitan karya sastra dan pasar pembelinya. Penerbit minimal mencetak 1000 eksemplar untuk disebarakan ke 1000 perpustakaan atau 500 perpustakaan dengan mendapatkan 2 eksemplar.

Disampaikan dalam Seminar Nasional “Bahasa, Sastra, dan Kekuasaan” yang dilaksanakan pada 26 November 2015 di Ruang Seminar Gedung PLA Lt 3, Fakultas Bahasa dan Seni, Univesitas Negeri Yogyakarta

Melalui politik pendidikan kesastraan diharapkan bangsa Indonesia mampu memahami kebudayaan dan pikiran bangsanya, mampu berkepribadian Indonesia dan menghargai karya-karya kemanusiaan bangsa lain melalui penerjemahan karya sastra. Sastra akan mampu memberikan pencerahan manakala pembaca mendapatkan kemanfaatan dengan memahami ekspresi para tokoh latar yang digambarkan, jalan cerita, dan tema yang ditulis pengarangnya.

Daftar Pustaka

- Budidarma (2007) *Bahasa, Sastra, dan Budidarma*. Surabaya: JP Books
- Dahlan, Muhidin M (2003) *tuhan ijinkan aku menjadi pelacur*. Jakarta: Melibas
- Fairclough (1989). *Language and Power*. New York: Longman Group UK.
- Heryanto (1996) "Bahasa dan Kuasa: Tatapan Postmodernisme" dalam *Bahasa dan Kekuasaan Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung: Mizan
- Latif dan Ibrahim, (1996:15) *Bahasa dan Kekuasaan Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung: Mizan
- Rosidi, Ajip (1984) "Politik Bahasa Nasional dan Pengembangan Kesusasteraan" dalam *Politik Bahasa Nasional 1*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Taufik Tan (2008) *Sang Penghadang*. Depok: Manhaj.
- Tempo. (2013) " Biji yang Tumbuh dari Kor Kapel" .*TEMPO Edisi Khusus "Teka-Teki Wiji Thukul*. Edisi 13-19 Mei 2013
- Utami, Ayu, (Ed) (1994) *BREDEL 1994 Kumpulan Tulisan tentang Pembredelan TEMPO, DETIK, EDITOR*, Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen.

Tentang Penulis:

Dr. Suroso, M.Pd. Lahir di Kediri, 30 Juni 1960. Lektor Kepala di Program Studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. FBS – Universitas Negeri Yogyakarta. Menulis buku *Estetika* (Pararaton Publishing, 2009), *Kritik Sastra* (Pustaka Elmathera, 2008) *Drama: Teori dan praktik Pementasan* (Elmathera Publishing, 2015).

Disampaikan dalam Seminar Nasional "Bahasa, Sastra, dan Kekuasaan" yang dilaksanakan pada 26 November 2015 di Ruang Seminar Gedung PLA Lt 3, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta